



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Menggagas Dimensi Kinerja Perusahaan Berdasarkan Perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA)

Ayudia Sokarina
Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

ABSTRACT

This study aims to initiate dimensional firm performance by using the perspective of the political economy of accounting. This research is motivated by the fact that the assessment of corporate performance using financial performance is not enough because in principle the financial performance is only capable of representing shareholder ownership by ignoring ownership stakeholders. On the other hand considered the environmental performance assessment meets the interests of stakeholders, especially in terms of environment, however, the implementation has been oriented to the shareholders. By doing critical analysis on the results of the discourse over the issue of privatization, the study find other reality showed that the Government understand privatisation as a tool to achieve economic rents, privatisation has failed to make the distribution of ownership, and along with it the process of exploitation of consumers in the form of higher rates for increased intensive (case in PT Telkomsel)

As a result dimensional performance of the company consists of physical parameters, social justice and socio-political consciousness. According Sztompka (2008: 262) that the awareness (of anything) can be a cheater and even driving the emergence of the idea of a critical and sharp in understanding reality.

Keywords: *Political Economy Of Accounting, privatisation, economic rents, distribution of ownership, and exploitation of consumers*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama ini penelitian-penelitian bidang akuntansi khususnya melakukan penilaian kinerja perusahaan masih sebatas menggunakan aspek keuangan (selanjutnya disebut kinerja keuangan) meskipun pada akhir-akhir ini telah diperluas dengan aspek lingkungan (selanjutnya disebut kinerja lingkungan). Pada perusahaan-perusahaan multinasional atau Badan Usaha Negara (BUMN) terutama yang telah diprivatisasi atau bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menilai kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan kinerja



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

keuangan semata dirasa belumlah cukup, karena pada prinsipnya kinerja keuangan hanya mampu merepresentasikan kepemilikan pemegang saham (*shareholders*) dengan mengabaikan kepemilikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di sisi lain penilaian kinerja lingkungan dianggap telah memenuhi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam hal lingkungan hidup, namun, pada pelaksanaannya masih berorientasi pada *shareholders*. Orientasi pada *shareholder* semata, tidak terlepas dari sejarah pemikiran ekonomi yang didominasi oleh pemikiran ekonomi neoklasik (marjinalis). Menurut Tinker (1980; 149) paradigma ekonomi bisa berpengaruh pada pembentukan teori akuntansi. Teori akuntansi sendiri mendapat kontribusi lebih banyak dari teori ekonomi neo-klasik (marjinalis). Kontribusi marjinalisme terhadap akuntansi digambarkan oleh Tinker dalam menentukan teknik produksi yang paling diinginkan sosial (lihat Tinker, 1980; 149). Namun, para pakar ekonomi neoklasik (marjinalis) mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi keinginan sosial. Berdasarkan kelemahan itu, Tinker menggunakan pemikiran ekonomi politik klasik dalam memahami data akuntansi meskipun memiliki akar sejarah yang lebih jauh ke belakang. Selanjutnya pemikiran ekonomi politik klasik menjadi pijakan bagi pengembangan perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA)

Berdasarkan perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA), peningkatan pendapatan pada perusahaan-perusahaan multinasional ataupun BUMN bahkan BUMD di suatu Negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di Negara tersebut. Dalam artian ada pengaruh tetesan menurun (*trickle down effect*). Implikasinya hasil



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

perusahaan dalam wujud kinerja keuangan tidak bebas dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan *setting* sosial politik turut berperan dalam mempertahankan *going concern* perusahaan-perusahaan ini. Contohnya, masih segar dalam ingatan kita kasus privatisasi PT Telkom atas anak perusahaannya PT Telkomsel dan PT Indosat pada tahun 2002, berdasarkan penelitian Sokarina (2011) menemukan peran realitas sosial politik sebagai determinan penilaian kinerja PT Telkom dan PT Indosat yang tercermin melalui wacana pro dan kontra privatisasi PT Indosat dan PT Telkom (melalui PT Telkomsel). Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan mengagas dimensi kinerja perusahaan berdasarkan perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA).

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah dimensi kinerja perusahaan berdasarkan *Political Economy of Accounting* (PEA)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengagas dimensi kinerja perusahaan dengan menggunakan perspektif *Political Economy of Accounting* (PEA).

2. PIJAKAN TEORITIS

***Political Economy Of Accounting* (PEA)**

Political Economy Of Accounting (PEA) ini pertama kali diintrodusir oleh Tinker (1980) dalam tulisannya yang berjudul “*Towards a Political Economy of Accounting: an*



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Empirical Illustration of the Cambridge Controversies". Menurut pandangan Tinker, pemikiran teori ekonomi politik klasik berbeda dengan pemikiran teori ekonomi neoklasik (marjinalis). Sehingga teori ekonomi politik klasik lebih tepat dijadikan dasar teori akuntansi. Di dalam penelitiannya ini Tinker membedakan kedua teori ekonomi atas pemaknaan laba dan modal.

Sebelumnya Hoogvelt dan Tinker (1978) melakukan penelitian yang mengawali pemikiran tentang PEA pada perusahaan multinasional (Delco) asal Inggris yang beroperasi di Afrika (Sierra Leone). Dalam kajiannya Hoogvelt dan Tinker (1978) menemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan multinasional itu pada setiap periodisasi (prakolonial, kolonial, dan pascakolonial) di Negara Afrika yang notabeneanya sebuah Negara miskin sangat dipengaruhi oleh *setting* politik dan aturan main yang ada di Negara tersebut.

Dilanjutkan lagi melalui penelitian Cooper dan Sherer (1984: 217) dengan *Political Economy of Accounting* (PEA) penelitian akuntansi mampu melihat fungsi akuntansi ke dalam struktur yang lebih luas dan lingkungan aturan main (*institutional environment*) tempat akuntansi beroperasi. Selain itu, penelitian akuntansi sebaiknya merefleksikan konteks sosial, politik dan konteks ekonomi tempat akuntansi dipraktikkan (Cooper dan Shearer, 1984: 225).

Berkembangnya penelitian akuntansi menggunakan PEA, diteruskan dalam penelitian Shaoul (1997a, 1997b) yang menguji kasus privatisasi pada perusahaan air minum di Inggris. Pada penelitian pertama, Shaoul menguji klaim pemerintah bahwa privatisasi semakin meningkatkan efisiensi bagi industri, pelanggan, dan Negara. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan efisiensi dan distribusi laba dipandang sebagai konflik antara publik



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

dengan pemegang saham. Penelitian keduanya menguji model akuntansi dan sejumlah akun keuangan pada laporan tahunan dan menguji apakah akuntansi dapat berperan sebagai pembangun (*constructive*) dan pembebas (*emancipatory*) dalam menghadapi berbagai masalah publik. Hasilnya menunjukkan bahwa model akuntansi yang tersedia untuk publik dapat digunakan sebagai data untuk menganalisis tujuan sosial dan kritik ekonomi. Selanjutnya akuntansi dapat berperan sebagai pembangun (*constructive*) dan pembebas (*emancipatory*) bagi berbagai masalah yang timbul.

Sementara itu Shaoul (2003) kembali melakukan penelitian PEA pada rumah sakit di Inggris. Penelitian ini menguji proses, metodologi keuangan pembangunan rumah sakit baru di bawah kebijakan privatisasi pemerintah Inggris. Hasilnya menunjukkan bahwa konsepnya jauh dari sifat netral dan terdapat motif rasional untuk proses transfer sumberdaya dari publik kepada elit keuangan, sehingga isu distribusi menjadi terlupakan.

Penelitian PEA lainnya dilakukan oleh Arnold dan Cooper (1999) dalam Irianto (2006) menguji peran akuntansi pada kebijakan privatisasi pelabuhan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan dalam masyarakat terkait distribusi kekayaan dan pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Penelitian Uddin dan Hopper (2003) juga menguji kasus privatisasi pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini mempertanyakan klaim oleh Bank Dunia dan IMF mengenai perbaikan berbagai fasilitas, perbaikan pengawasan dalam perusahaan, dan peraturan bagi perilaku pasar keuangan atas laporan akuntansi eksternal. Klaim ini kemudian dibandingkan dengan kinerja perusahaan di Banglades pasca privatisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

privatisasi tidak meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan kontribusi perusahaan-perusahaan privatisasi pada Negara menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.

Di Indonesia, penelitian dengan menggunakan PEA diintrodusir oleh Irianto (2004). Penelitiannya pada kasus privatisasi perusahaan Semen Gresik Tbk (SG), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi pada industri semen. Hasilnya menunjukkan bahwa ada penolakan dari berbagai *stakeholders* atas hegemoni perusahaan multinasional (MNC). Demikian juga berbagai isu tentang keadilan dan kejujuran, keamanan kerja, aspek keuangan pada kedaulatan ekonomi semakin meningkat. Sementara itu isu fundamental berupa distribusi kesejahteraan dan kekuasaan tidak berbeda dengan penelitian-penelitian PEA sebelumnya.

Penelitian Andrianto (2007) juga menggunakan PEA dalam menganalisis struktur kepemilikan korporasi pada kasus kepemilikan silang kelompok usaha Temasek *Holdings Ltd*, terhadap PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia maupun perusahaan swasta lokal tidak mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas ekonomi. Dengan kata lain struktur kepemilikan asing telah gagal melakukan distribusi laba dan distribusi kesejahteraan.

Penelitian Andrianto (2008) dan Andrianto dan Irianto (2008) menggunakan *New Political Economy of Accounting* (N-PEA), yaitu menggabungkan konsep PEA dengan teori rasional pilihan (*rational choice theory*) dan teori keadilan (*justice theory*) dalam menguji kinerja perbankan BUMN Indonesia. Hasilnya bahwa distribusi laba perbankan BUMN Indonesia telah gagal pemeratakan kesejahteraan masyarakat.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Penelitian Sokarina (2011) menggunakan *Modified Political Economy of Accounting* (M-PEA), yaitu mengombinasikan PEA dengan hermeneutika Gadamerian guna menilai kinerja PT Telkom dan PT Indosat pra dan pascaprivatisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Telkom pascaprivatisasi semakin membaik. Di sisi lain, distribusi labanya semakin membaik hanya kepada karyawan sedangkan *stakeholders* lainnya terabaikan. Kinerja keuangan PT Indosat pascaprivatisasi semakin memburuk namun distribusi labanya semakin membaik pada karyawan, kreditor, dan pemerintah. Realitas lainnya menjelaskan bahwa Pemerintah memahami privatisasi sebagai piranti untuk meraih rente ekonomi, privatisasi telah gagal melakukan distribusi kepemilikan, dan seiring dengan itu proses eksploitasi terhadap konsumen dalam bentuk tarif yang tinggi bertambah intensif (kasus pada PT Telkomsel). Akibatnya privatisasi PT Telkom dan PT Indosat telah gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara.

3. METODA PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Analisis wacana berdasarkan perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA) digunakan untuk mencatat realitas yang tercipta dari berbagai wacana yang diproduksi oleh Pemerintah, Manajemen, Karyawan dan Masyarakat mengenai isu privatisasi pada BUMN yang menjadi amatan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan penelusuran data *online*. Dokumen yang dikumpulkan sebagian besar berupa teks tulis empat pihak penutur wacana yang dipilih melalui media cetak dan internet.

Pemilihan Penutur Wacana

Penutur wacana yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas: (a) pemerintah, (b) manajemen, (c) karyawan, dan (d) masyarakat. Pemerintah, karyawan dan masyarakat mewakili *stakeholders*, manajemen dan pemerintah mewakili *shareholders*. Pemerintah memegang dua peran sebagai *stakeholders* karena pemerintah bertindak sebagai penerima pajak dari kegiatan ekonomi perusahaan dan sebagai *shareholder* karena BUMN adalah perusahaan di bawah kepemilikan dan kontrol pemerintah. Tabel 1 menunjukkan penutur wacana terpilih dalam penelitian ini.

Tabel 1.
Penutur Wacana Terpilih Dalam Penelitian

Identitas Penutur	Bidang Pekerjaan/Posisi/ Jabatan Dalam Organisasi
A. Pemerintah 1. Rus Arya Wijaya 2. Laksamana Sukardi 3. Dorojatun Kuntjorojakti 4. Bacelius Ruru 5. Mahmudin Yasin	Deputi Meneg BUMN bidang usaha, Pertambangan Energi, industri strategi, dan telekomunikasi Menteri Negara Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1999-2000 Menko Perekonomian periode 2001-2004 Sekretaris kementerian BUMN Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN
B. Manajemen 1. Widya Purnama 2. Adita 3. Muhammad Nasif	Direktur Utama Indosat periode 2002-2004 Kepala Divisi Humas Indosat Direktur Utama PT Telkom
C. Karyawan 1. Abu Syukur	Ketua Presidium ISP Postel



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Identitas Penutur	Bidang Pekerjaan/Posisi/ Jabatan Dalam Organisasi
2. Sukur Mulya Maldi	Ketua Dewan Pimpinan Pusat ISP Indosat
3. Bambang Koko	Ketua DPP Sekar Telkom
4. H.M Ismail	Anggota ISP Postel
D. Publik	
1. Abdurrahman	Warga Negara Indonesia di Jakarta
2. Bin Nahadi	Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI)
3. Satya Wijayantara	Sekjen FSP BUMN Bersatu
4. B.Herry Priyono	Alumnus LSE
5. Li Che We	Pengamat Ekonomi
6. Mar'i Muhammad	Mantan Menteri Keuangan era pemerintahan Soeharto
7. Fahri Hamzah	Anggota Komisi VI DPR Dari PKS
8. Marwan Batubara	Anggota DPD
9. Aviliani	Pengamat Indef
10. Didiek Rachbini	Pengamat Ekonomi Indef
11. Dradjat H.Wibowo	Ekonom Senior Indef
12. Ichsanuddin Noorsy	Pengamat Ekonomi
13. Darul Siska	Anggota DPR Komisi IV Tahun 2002
14. K.H.Abdurrahman Wahid	Mantan Presiden RI ke 4
15. Hasto Kristianto	Anggota Komisi VI DPR dari PDI-P
16. Faisal Basri	Pengamat Ekonomi

4. HASIL ANALISIS WACANA

Wacana Pro Kontraprivatisasi Sebagai Sebuah Realitas Sosial Politik

Wacana Pemerintah

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 1999 mengenai Buku Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi kemudian dilengkapi dengan terbitnya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, secara jelas menyebutkan sasaran reformasi telekomunikasi adalah untuk meningkatkan kinerja sektor, melaksanakan transformasi struktur industri dari monopoli menjadi industri yang pro kompetisi, memfasilitasi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, mendapatkan tambahan dana untuk



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

pembangunan nasional melalui privatisasi, meningkatkan kerjasama dengan swasta lokal maupun asing, menyediakan dan memperbanyak akses publik terhadap jaringan telekomunikasi, serta meningkatkan transparansi dalam regulasi guna mengembalikan kepercayaan investor.

Sejauh mengacu pada ketetapan Pemerintah berkenaan dengan sasaran reformasi telekomunikasi berupa privatisasi pada sektor ini adalah wacana inti yang ingin diwujudkan. Dari sudut pandang analisis wacana, di dalam berbagai pernyataan aparatur pemerintah mengenai privatisasi pada PT Telkom dan PT Indosat, terkandung kekonsistenan. Dari sudut pandang analisis wacana, di dalam berbagai pernyataan aparatur pemerintah mengenai privatisasi pada PT Telkom dan PT Indosat, terkandung kekonsistenan. Berikut adalah petikan pernyataan Deputy Meneg BUMN Bidang Usaha, Pertambangan, Energi, Industri Strategis dan Telekomunikasi, Rus Arya Wijaya yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya.

Dalam dialog dengan ISP (Ikatan Serikat Pekerja) Pos dan Telekomunikasi Indosat dan Telkom, Rus Arya Wijaya mengatakan, privatisasi yang direncanakan pemerintah bukan keputusan yang bersifat mendadak, tetapi telah dikonsultasikan dengan DPR. Rencana tersebut juga telah dibicarakan dengan pihak Direksi masing-masing BUMN termasuk Indosat.

"Jadi, kebijakan privatisasi tidak langsung jadi. Sudah melalui proses termasuk konsultasi dengan DPR. DPR 'kan juga wakil rakyat. Juga telah dibicarakan dengan direksi. Saya tidak tahu apakah direksi Indosat sudah berbicara dengan para karyawannya atau belum," ujar Rus Arya Wijaya (Sinar Harapan, 21 Maret 2002)

Proses legislasi privatisasi, sejauh mengacu pada pernyataan Rus Arya Wijaya juga merupakan wacana yang berusaha dikembangkan. Karena privatisasi atas PT Telkom dan PT Indosat telah memenuhi aspek legislasi inilah bahwa apapun yang telah dilakukan oleh



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan adalah kebenaran. Warga Negara dalam konteks ini diwakili oleh para karyawan PT Telkom dan PT Indosat dipaksa untuk mendukung setiap “kebenaran” yang direproduksinya.

Barangkali Pemerintah menganggap bahwa “kebenaran” privatisasi sebagai sebuah langkah penanganan BUMN tidak semata-mata karena menjalankan reformasi telekomunikasi melainkan bahwa selama ini kinerja BUMN cenderung menurun sehingga memberatkan Pemerintah. Penegasan ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Negara Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi beserta konteks yang melingkupinya.

"Kalau kita terus memelihara dan mempertahankan BUMN yang bobrok dan merugi terus, pemerintah harus terus menanggung bebannya, sementara tidak ada manfaat yang bisa diambil dari BUMN seperti itu," kata dia. "Jika kita menjual BUMN, maka hal itu akan mendatangkan keuntungan, mulai dari penerimaan pajak kepada negara, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan-penerimaan lainnya. Nah, pilih mana?" Ia kemudian juga menyebutkan ketika krisis terjadi sejak Juli 1997, hampir tidak ada BUMN yang dapat memberikan manfaat apa-apa. Pemerintah justru malah menyuntikan dana obligasi ratusan trilyun rupiah. "Sebut saja sebuah bank asing yang notabene tidak disuntik dana oleh pemerintah, namun tetap menyetorkan pajaknya kepada pemerintah dan menyerap tenaga kerja," kata Laksamana. "Artinya, merekalah yang menghidupi negeri ini. Tetapi, bagaimana dengan BUMN yang merugi? Selain merongrong, juga membuat beban pemerintah makin berat. Nah, di situlah makna penting dari asas manfaat ketimbang asas kepemilikan. Untuk apa dimiliki, kalau tidak mendatangkan manfaat? Kan, lebih bermanfaat dijual daripada dimiliki, tetapi merugi terus." (Tempo Interaktif, 24 Maret 2002).

Berdasarkan wacana di atas, Laksamana Sukardi tanpa sadar telah membongkar kegagalan pemerintah mengelola BUMN. Mengingat pemerintah menguasai mayoritas saham BUMN sehingga ia memiliki kekuasaan penuh mengubah susunan komisaris maupun direksi. Kondisi ini seharusnya membuat kekuatan internal pemilik (pemerintah) untuk mengontrol relatif kuat sehingga bisa mendorong manajemen bekerja seefisien mungkin. Ada hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa semua BUMN memiliki potensi ekonomi besar dan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

berusaha pada sektor-sektor sangat strategis sehingga memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kembali pengakuan akan perbaikan ekonomi sebagai tujuan privatisasi pada BUMN merupakan butir wacana yang dikemukakan oleh pihak Pemerintah sebagai bentuk kekonsistenan Pemerintah atas kebijakan privatisasi BUMN. Tampak jelas bahwa Pemerintah melalui wacana yang dikembangkan tetap membela keputusan Pemerintah. Berikut adalah petikan pernyataan Meneg BUMN beserta Menko Perekonomian berikut ini yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya.

“Dengan privatisasi ini, diharapkan akan dapat mendorong BUMN meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (corporate value) sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam industri sejenisnya di pasar nasional, regional dan global” ungkap Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi. Lebih lanjut juga menyebutkan bahwa program Privatisasi yang ditempuh pemerintah ini merupakan salah satu upaya mempercepat perbaikan ekonomi sehingga pada akhirnya akan memberikan kegunaan bagi masyarakat”. (Tempo Interaktif, 3 April 2002).

Meskipun Pemerintah lebih menekankan privatisasi BUMN sebatas aspek ekonomis namun arus deras protes dari banyak kalangan menjadikan wacana baru lagi, yaitu tuduhan bahwa privatisasi dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Berikut pernyataan lain Laksamana Sukardi beserta konteks yang melingkupinya, ketika kebenaran privatisasi PT Indosat terselubung masalah politis. Mengingat partai yang berkuasa saat itu adalah PDI-P, kendaraan yang membawa Laksamana Sukardi menjadi Meneg BUMN.

Pelbagai rumor yang menyatakan bahwa ICL bukan cuma kendaraan STT, melainkan juga kendaraan para pentolan PDI-P untuk nebang memiliki saham Indosat secara diam-diam. "Kalau itu yang dituduhkan, silakan periksa saja apakah ada saham kosong atau kongkalikong," kata Laksamana Sukardi, gusar. (www.Kompas.com, 29 Januari 2003).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Menepis isu seputar privatisasi pada PT Telkom dan PT Indosat merupakan nilai lain yang berusaha ditonjolkan Pemerintah. Penegasan Pemerintah bahwa isu-isu negatif pada proses privatisasi khususnya privatisasi PT Indosat demi memperkuat opini publik akan “kebenaran” kebijakan Pemerintah ini. Tapi perlu diperhatikan, menurut Tranggono (2009) sejauh ini masyarakat mengenal tiga macam kebenaran, yaitu kebenaran personal (kebenaran subyektif), kebenaran orang banyak (kebenaran obyektif), dan kebenaran sejati (kebenaran Ilahiah). Ketika kebenaran subyektif menindas kebenaran obyektif dan kebenaran sejati, yang terjadi adalah distorsi nilai dan sistem sosial yang timpang. Kebenaran subyektif dalam lingkup Negara terlihat pada pernyataan berikut yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya. Tampak pula bagaimana penulis berita ini membuat penafsiran yang memperkuat “kebenaran” ini.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan buku putih tentang proses privatisasi Indosat. Buku ini dibagikan pada wartawan di Hotel Novotel, Bogor, oleh para pejabat kementerian ini, Minggu (2/2) . Selain menjelaskan proses penjualan saham pemerintah di PT Indosat secara kronologis, buku ini juga memberikan penjelasan sebagai jawaban atas munculnya berbagai isu miring seputar divestasi ini. Isu-isu yang coba dijawab antara yaitu mengenai adanya “special purpose vehicle” atau SPV oleh Singapore Telemedia Limited (STT) melalui Indonesia Communications Limited (ICL), dalam transaksi akuisisi Indosat. Menurut buku ini, penggunaan SPV dalam transaksi serupa bukan hal yang luar biasa. Tujuannya untuk memisahkan suatu unit usaha dalam sebuah grup dalam hal pendanaan maupun perencanaan pajaknya. Selain itu, penggunaan ICL sebagai kendaraan investasi oleh perusahaan Singapura itu dikatakan telah diinformasikan pada penasehat keuangan dalam proses divestasi ini sejak dalam tahap penawaran awal. Apalagi, katanya, langkah sejenis, yakni menggunakan SPV yang berkedudukan di Mauritius, juga akan dilakukan oleh para penawar lainnya. Kementerian BUMN juga membantah adanya dana yang hilang atau tidak tercatat yang digunakan sebagai komisi pada pihak tertentu atas hasil penjualan saham negara. (Tempo, 2 Februari 2003).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Nilai yang bersifat materiil adalah isu utama yang menjadikan kebijakan privatisasi terhadap sektor ini seringkali dipandang negatif. Demikian juga dengan privatisasi PT Telkom lagi-lagi dianggap banyak kalangan harganya terlalu murah.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN, Mahmudin Yasin mengungkapkan, dari hasil penerimaan privatisasi 11,9 persen saham pemerintah di Telkom diperoleh dana sebesar Rp 3,12 triliun. Mahmudin membantah, penjualan saham Telkom terlalu rendah harganya. “Diskon yang diberikan, yakni 3,7 persen jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya, yakni sebesar 4,5 persen. Diskon semacam ini biasa dilakukan dalam penjualan secara block sale,” (www.kompas.com).

Berbagai wacana yang diproduksi oleh Pemerintah membawa akibat semakin lama keberterimaan Pemerintah di legislatif dan publik semakin menurun dan ini pun akan berdampak pada pemerintahan yang berkuasa, yaitu era kekuasaan Megawati. Kebijakan Megawati untuk menjual PT Indosat mengandung risiko yang sangat besar, bahwa Megawati mendapatkan serangan dari lawan politiknya yang menurut banyak kalangan sebagai keteledoran masa lalunya pada saat menjelang Pilpres tahun 2004. Akibatnya pada Pilpres 2004 Megawati gagal menjadi presiden kembali meskipun partainya mengalami kemenangan.

Menjadi pemikiran kita bahwa “kebenaran” yang didengung-dengungkan pemerintah merupakan sebuah kebohongan. Kebohongan yang dilakukan secara kontinu, intens, sistemik, dan massif dapat menjelma menjadi sebuah rezim. Rezimisasi kebohongan mencerminkan praktik-praktik sistem pemerintahan suatu Negara. Ketika kebohongan telah beranak-pinak menindas kebenaran, dalam konteks politik, warga tidak menemukan demokrasi sejati sehingga kedaulatan rakyat pun tersandera di tangan penguasa (Tranggono, 2009: 6). Dalam konteks ekonomi, warga Negara tidak menemukan penghidupan yang layak dan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

menyejahterakan karena ekonomi dihegemoni kelompok elit. Inilah yang terjadi pada PT Telkom dan PT Indosat setelah diprivatisasi.

Wacana Manajemen

Proses reformasi telekomunikasi dalam implementasinya mengalami berbagai perubahan yang sangat cepat seiring pesatnya perkembangan teknologi telematika yang merupakan konvergensi dari telekomunikasi, teknologi informasi, multimedia dan penyiaran. Dinamisnya sektor ini telah membawa banyak perkembangan di industri telekomunikasi, PT Telkom dan PT Indosat sebagai pemain dalam industri ini mau tidak mau menjadi “korban” dari proses itu. Pilihan privatisasi sebagai alternatif reformasi telekomunikasi membuat pihak manajemen perusahaan sebagai garda depan dalam menghadapi berbagai kontra dari banyak kalangan.

Pihak manajemen perusahaan adalah pihak yang tidak banyak membuat pernyataan mengenai privatisasi atas PT Telkom dan PT Indosat. Padahal kesuksesan privatisasi tidak terlepas dari peran mereka untuk meningkatkan nilai jual. Ditinjau dari analisis wacana terkandung kebingungan, suatu waktu manajemen merasa tidak dilibatkan, dilain waktu manajemen berusaha membela kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, koherensi wacana ini tidak bisa diwujudkan. Berikut adalah petikan pernyataan pihak manajemen yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya.

Muncul kabar bahwa STT menggunakan kendaraan lain (special vehicle, SPV) untuk menguasai Indosat, mulailah meledak reaksi marah purpose banyak orang. Maklum saja, SPV yang ditunggangi STT adalah Indonesia Communication Limited (ICL) yang berpangkalan di Mauritius. "Saya sendiri baru tahu 20 Desember lalu kalau ada SPV itu," demikian pengakuan jujur Widya Purnama, Direktur Utama Indosat.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Sedikit banyak, kemunculan ICL memang merugikan Pemerintah Indonesia. Bentuknya adalah penerimaan pajak yang lebih sedikit. Sebab, sebagai perusahaan yang bermarkas di Mauritius surga keuangan internasional yang sering disebut tax heaven, ICL bakal membayar tarif pajak yang lebih rendah ke Pemerintah Indonesia, daripada jika STT secara langsung memiliki Indosat. Ini berpangkal pada perbedaan perjanjian pajak (tax treaty) antara Indonesia-Mauritius dengan Indonesia-Singapura. "Tapi ini adalah praktek bisnis internasional yang wajar. Malaysia pun sudah mempersiapkan SPV kalau menang," kata Widya .

Minta saja STT datang tanpa kendaraan Sebenarnya, soal SPV sebagai pembeli terselubung bukanlah masalah baru. Ingat saja bagaimana Bank Indonesia (BI) sampai kini masih berseteru dengan Farallon Capital gara-gara perkara yang sama dalam penjualan saham BCA.

Tapi, entah mengapa, pemerintah sepertinya tak peduli dan menganggap remeh persoalan. Demikian pula para penasihat keuangan pemerintah yang sudah dibayar bermiliar-miliar untuk mengurus perkara yang satu ini. "Nanti saya akan minta mereka menjelaskan," kata Widya seraya menyebut nama Danareksa dan Credit Suisse First Boston (CSFB) yang mestinya bertanggung jawab soal ini (www.kompas.com, 29 Januari 2003).

Nampaknya pihak manajemen masih setengah hati menerima keputusan privatisasi PT Indosat, karena masih ada syak wasangka dengan pihak yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab melakukan koordinasi program privatisasi BUMN termasuk untuk PT Indosat. Jelas pernyataan dari pihak manajemen berbanding terbalik dengan pihak dari pemerintah, melalui pernyataannya yang telah memenuhi aspek legislasi termasuk kepada pihak manajemen.

Pascaprivatisasi PT Indosat, tidak berarti PT Indosat menjadi baik-baik saja, berbagai kritik bermunculan terutama oleh pihak legislatif. Dalam menghadapi kritik itu pihak manajemen kembali menjadi garda terdepan melakukan pembelaan. Kasus salah kelola atau mismanajemen dalam transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2004-2006 ditanggapi



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

pihak manajemen PT Indosat sebagai dampak kebijakan akuntansi perusahaan. Berikut kutipan pernyataan manajemen beserta konteks yang melingkupinya.

Perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk diduga berpotensi merugikan negara akibat salah kelola atau mismanajemen dalam transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2004-2006. Dengan salah kelola tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan dividen sekitar Rp 323 miliar.

Temuan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany Senin (4/6) di Jakarta. Drajad meminta agar pandangannya tersebut ditindaklanjuti Komisi XI, Departemen Keuangan, Dirjen Pajak, Bapepam-LK, serta Kementerian BUMN. "Kasus kerugian transaksi derivatif yang luar biasa besar ini merupakan salah satu skandal keuangan yang sangat memprihatinkan. Apalagi kalau kita lihat kondisi makro membaik, pasar keuangan membaik, bagaimana mungkin perusahaan sebesar Indosat bisa mengalami kerugian transaksi derivatif yang sedemikian besar," katanya.

Kepala Divisi Humas Indosat Adita Irawati mengatakan, laporan keuangan tahun 2004 sampai tahun 2006 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Ernst & Young. "Laporan keuangan tersebut telah diaudit secara transparan dan sudah diterima oleh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) di tahun-tahun yang bersangkutan," kata Adita.

Untuk laporan keuangan tahun 2006, Indosat baru akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS hari ini. Agenda lain rapat mengenai pengangkatan direktur utama yang kosong.

Adita mengatakan, Indosat memang memiliki utang dalam dollar AS. Untuk melindungi pinjaman tersebut, perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan hedging atau lindung nilai, tanpa melakukan spekulasi terhadap fluktuasi rupiah. "Dampak dari hedging ini sebagian besar adalah non tunai yang dibukukan dalam laporan keuangan," katanya (www.kompas.com, 5 Juni 2007).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Proses privatisasi pada PT Telkom sepenuhnya menjadi kuasa pemerintah dan dukungan IMF, pihak manajemen tidak berperan aktif, adalah wacana yang dikembangkan pihak manajemen. Berikut pernyataan Direktur Utama PT Telkom.

Direktur Utama PT Telkom Tbk, Muhammad Nasif. Dirut PT Telkom itu mengemukakan, soal privatisasi BUMN telekomunikasi sepenuhnya menjadi hak pemerintah sebagai pemegang saham. Jajaran manajemen sendiri sebagai profesional, kendati penjualan saham Telkom dinilai banyak kalangan, nilainya terlalu rendah, IMF justru beranggapan sebaliknya. IMF menilai penjualan saham Telkom termasuk sukses (www.kompas.com).⁹

Ungkapan minimalis mungkin cocok untuk menggambarkan gaya berwacana pihak manajemen. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran mereka yang tidak berbeda seperti halnya karyawan. Hanya saja karyawan lebih agresif dengan berani menunjukkan sikap kontranya.

Wacana Publik

Dari analisis wacana, dalam opini publik berikut ini menyerukan mendukung privatisasi atas PT Indosat. Berikut adalah petikan pernyataan individu dari masyarakat umum beserta konteks yang melingkupi:

Abdurrahman (Jakarta): Mengontrol kelakuan monopolis Telkom seperti menaikkan tarif percakapan lokal sampai 33,3% adalah alasan terpenting mengapa Indosat perlu segera dijual ke tangan mitra strategis. Apa pun kata Telkom, menaikkan tarif begitu tinggi (tertinggi dalam sejarah!) ketika keuntungannya begitu besar (Rp 7,5 triliun hanya selama Januari-September 2002, terbesar dalam sejarah! dan hampir pasti yang terbesar yang dicatat perusahaan Indonesia, juga sepanjang sejarah) jelas berlebihan (www.detik.com).

Tarif tinggi adalah wacana yang ingin dikembangkan oleh Abdurrahman. Kebijakan tarif tinggi ini menurutnya sebagai implikasi dari struktur pasar PT Telkom yang monopoli. Setiap orang tentunya setuju bahwa PT Telkom terlalu lama sebagai pemain dalam pasar monopoli



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

menjadikannya seperti “lintah” simbol yang tepat kiranya sebagai penghisap darah. Namun PT Telkom menghisap masyarakat melalui tarif yang tinggi.

Tarif juga menjadi wacana oleh Didiek tapi dengan penjelasan yang berbeda. Tarif tinggi diakibatkan oleh dominasi kepemilikan oleh Temasek. Namun kedua wacana ini bermaksud senada bahwa rakyat Indonesia menjadi korban akibat hegemoni kelompok elit (PT Telkom ataupun Temasek). Berikut pernyataan Didiek J. Rachbini.

“Penguasaan dominan oleh Temasek otomatis akan berakibat pada pengendalian harga dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung” (Majalah Trust, 6 Agustus 2009).

Kembali tarif menjadi wacana oleh Faisal Basri dalam kaitannya dengan penyebaran penjualan saham PT Indosat. Pada intinya senada dengan pernyataan Didiek akibat kepemilikan Temasek. Berikut pernyataan Faisal Basri.

“Tapi langkah privatisasi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Maksudnya agar tercipta iklim kompetisi yang sehat, penjualan saham pemerintah seharusnya dilakukan secara menyebar, karena masih banyak investor di mancanegara yang punya reputasi bagus. Jangan Temasek saja yang diberi kesempatan, sebab nanti dia bisa mendikte harga” (Majalah Trust, 6 Agustus 2009).

Aspek legislasi dan aspek publik adalah wacana yang ingin dikembangkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Namun sebagai pihak yang terlibat dalam melegalkan kebijakan privatisasi atas PT Telkom dan PT Indosat, Hasto justru tidak meyakini kebijakan ini memenuhi aspek publik. Sehingga koherensi wacana ini tidak bisa diwujudkan. Berikut pernyataannya.

"Keputusan privatisasi terhadap Telkomsel dan Indosat merupakan keputusan politik ekonomi yang dilakukan pemerintah oleh pemerintah dan mendapatkan dukungan politik dari DPR di waktu itu." Dan karenanya, sangat wajar kalau keputusan itu harus di-`backup` dengan penegakan hukum dan perlindungan kepada investor. Yang perlu dipertanyakan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

sekarang, apakah kebijakan itu memberi manfaat kepada publik," tanya Hasto Kristianto (www.antara.co.id).

Sebagian meyakini bahwa privatisasi apapun bentuknya adalah penjualan kekayaan negara kepada asing. Disamping itu, privatisasi hanya akan mengalihkan pengurusan hajat hidup publik kepada mekanisme kapitalisme. Wacana ini senada dengan pernyataan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya.

Gus Dur menyatakan, penguasaan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh pihak asing sangat merugikan, bahkan membahayakan negara. Bahkan, kata Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China yang berbeda sistem sama-sama tidak membiarkan usaha telekomunikasinya dikendalikan dan dikuasai pihak lain demi kepentingan bangsanya. "Untuk itu, saya menganjurkan pembelian kembali saham Temasek Holding pada Telkomsel dan Indosat oleh negara atau usaha nasional segera dilakukan. Hal ini juga sangat baik bagi hubungan Singapura Republik Indonesia di masa depan," kata Gus Dur. Gus Dur mengakui, ketika menjabat presiden, sudah ada usaha modal asing yang ingin menanamkan investasi pada PT Telkomsel melalui pembelian saham. Namun, tambah Gus Dur, saat itu ia mengarahkan Menteri BUMN Rozy Munir agar memberikan kesempatan kepada modal nasional. "Kalau tidak salah, PT Setdco Megacell Asia (perusahaan milik pengusaha Setiawan Djody, red) berminat di bidang ini. Saya tidak tahu mengapa hal itu tidak terlaksana,"katanya. (<http://id.mail.yahoo.com/>).

Ketidakadilan kultural menjadi wacana yang dikembangkan oleh Gus Dur. Ketidakadilan kultural ini tercermin dari porsi besar yang diberikan pada investor asing telah menyebabkan penguasaan asing pada PT Telkom (PT Telkomsel) dan PT Indosat. Ada pengabaian hak investor lokal pada proses privatisasi. Meskipun kebijakan privatisasi pada BUMN khususnya PT Telkom dan PT Indosat ini pada dasarnya bukan dosa pemerintahan saat itu (era Megawati) semata, sebelumnya pemerintahan era Gusdur pun sudah lama merencanakan, meskipun harapannya sebaiknya dijual pada investor lokal.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Melanjutkan pendapat pihak lain terhadap privatisasi adalah sebagai upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan BUMN yang pada akhirnya menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Keberadaan pemilik lain selain Negara diharapkan akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola BUMN sehingga praktik-praktik KKN dapat diminimalisir. Dan muaranya adalah terjadinya peningkatan kontribusi BUMN pada *stakeholders* khususnya pemerintah dan masyarakat. Wacana demikian senada dengan pernyataan oleh Satya Wijayantara.

Privatisasi, kata Satya, justru akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Memang, dengan privatisasi banyak pejabat yang akan kehilangan kenikmatan. " BUMN kita kenal sebagai sarang korupsi dan breeding ground untuk berbagai kasus korupsi (www.google.com, 15 April 2007).

Barangkali Satya menganggap bahwa sumber krisis BUMN ini adalah masalah *agency* yang dihadapi BUMN lebih pelik sebab pengelolaan BUMN melibatkan beberapa *agent*, yaitu manajemen, pemerintah dan DPR. Masalah *agency* antara manajemen dan pemerintah: apakah tindakan manajemen dalam mengelola BUMN sejalan dengan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Masalah *agency* selanjutnya yaitu pemerintah dan DPR: apakah DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah, termasuk dalam mengelola BUMN.

Arah angin opini masyarakat akan selalu menghadirkan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengkalkulasi dukungan politis atas setiap keputusan privatisasi. Terlebih lagi pada momen menjelang pemilu (tahun 2004), di mana menjadi saat-saat yang sensitif bagi pengambilan keputusan. Upaya kalangan yang anti privatisasi untuk menjadikan isu privatisasi sebagai komoditas untuk menggalang dukungan sekaligus upaya *demarketing* bagi



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

incumbent, bukan tidak mungkin telah menjadi penghalang proses privatisasi. Sehingga mengutip pernyataan B Herry Priyono bahwa Privatisasi atas PT Indosat tidak terlepas dari muatan politis.

Divestasi 41,94 persen saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT) bukan sekadar peristiwa transaksi finansial, tetapi peristiwa politik karena menyangkut pengalihan sumber daya dan bentuk kekuasaan. Karena itu, tuturan "Jangan Biarkan Privatisasi Indosat Dipolitisasi" hanya muncul dari pengandaian, uang bukan kekuasaan; suatu asumsi yang tidak punya dasar. Divestasi Indosat adalah peristiwa dan persoalan politik (www.kompas.com).

Tentu saja yang dimaksud muatan politis adalah agar proses divestasi tidak diperkeruh keterlibatan para makelar yang bertarung untuk kepemimpinan Republik dalam Pemilu 2004. Tetapi, dalam konteks di atas, isolasi divestasi dari proses pertarungan kekuasaan kenegaraan tak mungkin dihindarkan, sebab pengalihan saham juga merupakan persoalan politik (alokasi dan pengalihan sumber daya kekuasaan).

Muatan politis pada privatisasi PT Telkom dan PT Indosat mau tidak mau diakui oleh pengamat ekonomi Li Che Wei meskipun ada kekecewaan mendalam mengingat privatisasi PT Indosat menurutnya adalah isu perusahaan dan ekonomi. Berikut pernyataan Li Che Wei.

*" Perjuangan ini tidak dapat dicapai dengan melakukan pemogokan dan sabotase terhadap proses divestasi, tanpa memberikan solusi alternatif."
Kisruhnya divestasi Indosat sangatlah memprihatinkan. Kasus divestasi yang sebenarnya merupakan isu perusahaan dan ekonomi telah berkembang menjadi isu politik. (Tempo, 2 Januari 2003).*

Kekecewaan Li Che Wei atas privatisasi PT Indosat menjadi isu politis justru oleh Mar'ie Muhammad dinyatakan sebagai hal biasa bahwa kasus privatisasi itu tidak terlepas dari aspek politis. Ini menunjukkan ada pro-kontra dalam melihat kasus privatisasi PT Indosat dan PT Telkom. Berikut pernyataan Mar'ie Muhammad.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Kita tahu dimanapun juga didunia tidak ada politik dan kekuasaan tanpa uang, sekalipun di AS sebagai kampiun demokrasi (Tempo, 2 Januari 2003).

Kalau Mar'ie Muhammad menyebut dalam kasus privatisasi PT Telkom dan PT Indosat dibonceng muatan politis sebagai hal biasa, sebab dimanapun juga di dunia tidak ada politik dan kekuasaan tanpa uang. Sebuah fakta dari ungkapan Lord Acton bahwa *power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely* (Shambazy, 2010).

Kontra-Wacana Privatisasi

Memulai pembacaan terhadap kontra wacana sosial politik privatisasi ini merupakan kumpulan produksi oleh berbagai pihak: karyawan PT Telkom dan PT Indosat, legislatif, dan masyarakat umum. Ini menunjukkan adanya resistensi yang kuat dari publik terhadap privatisasi kedua BUMN ini. Berikut pernyataan dari legislatif beserta konteks yang melingkupinya.

Anggota komisi VI DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menegaskan sejak awal pembelian saham Indosat oleh perusahaan asing itu banyak keganjilannya. "Terus terang, saya menyesalkan sikap Komisi V DPR saat itu yang menyetujui privatisasi Indosat," katanya. Dia mendukung langkah yang ditempuh FSP (Federasi Serikat Pekerja) BUMN Bersatu yang melaporkan Temasek Holdings, Indosat dan PT Telkomsel ke KPPU. Tindakan yang dilakukan tiga perusahaan tersebut bisa diindikasikan melakukan pelanggaran UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Bisnis Indonesia, 12 Januari 2009).

Tampaknya Fahri Hamzah secara individu tidak menyetujui privatisasi PT Telkom dan PT Indosat dari sisi proses privatisasinya. Ada keganjilan dalam prosesnya sehingga dihegemoni oleh perusahaan asing serta proses transaksinya cacat hukum adalah wacana yang dikembangkan oleh anggota legislatif ini. Hal yang berbeda dari cara pandang karyawan PT Telkom dan PT Indosat melihat privatisasi ini sebagai langkah yang tidak seharusnya diambil



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

pemerintah. Tanpa memperdulikan bagaimana prosesnya dan pelaksanaannya. Berikut pernyataan para karyawan beserta konteks yang melingkupinya.

Ketua Presidium ISP Postel, Abu Syukur, mengatakan, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menjual saham PT Indosat. Kenapa cari duit untuk menghidupi perekonomian malah kekayaannya yang dijual. Ini membuat Indonesia miskin di masa depan (Sinar Harapan, Kamis 21 Maret 2002).

Juru bicara ISP Postel HM Ismail, mengatakan, penjualan Indosat kepada pihak asing akan merugikan negara triliun rupiah. Jadi, harus dicegah sejak dini. Jika pemerintah tetap ngotot dengan rencana itu, kita akan berjuang terus sampai tuntutan kami berhasil. Tuntutan ISP Postel, lanjut Ismail, hanya satu, yakni pemerintah harus membatalkan rencana penjualan 65 persen saham Indosat kepada pihak asing. "Jika pemerintah tetap ngotot menjual saham Indosat, jalan terakhir yang akan kami tempuh, yakni sekitar 100.000 karyawan BUMN telekomunikasi di Indonesia akan melakukan mogok kerja. Ini bukan ancaman, tapi benar-benar akan kami lakukan, jika pemerintah tetap ngotot menjual Indosat," cetus Ismail lagi (Sinar Harapan, Kamis 21 Maret 2002).

Kontra yang sedikit berbeda diungkapkan Satya Wijayantara dalam wawancaranya. Dia menilai para anggota legislatif seperti pahlawan kesiangian atas kasus privatisasi PT Indosat. Mungkin karena legislatif adalah pihak yang turut berperan atas legalitas kebijakan ini. Terlihat dari hasil wawancaranya beserta konteks yang melingkupinya.

Satya Wijayantara dalam wawancaranya ketika ditanya mengenai ribut ribut soal Indosat oleh sejumlah elit politik dan Marwan Batubara (anggota DPD) memberikan penjelasan tentang proses privatisasi PT Indosat Tbk. Penjelasan yang diberikan Laksamana itu sebenarnya bukanlah hal baru. Semuanya menyangkut technicalities proses privatisasi yang menunjukkan ketaatan (compliance) pada asas. Proses privatisasi Indosat itu selalu mendapat perhatian media massa. Sejak 1999 hingga 2002, MPR selalu mengamanatkan perlunya restrukturisasi dan privatisasi BUMN," jadi Saya rasa Para Politisi dan Elit Politik Yang masih terus mempermasalahakan Privatisasi BUMN sebenarnya tidak mengetahui arti asas manfaat dalam ketetapan MPR yang harus dijalankan oleh pemerintah .

Politisi dan Elit Politik Mungkin Lupa , APBN adalah undang-undang. Dan, notabene, undang-undang itu dikeluarkan oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif. Undang-undang APBN itu telah menyepakati anggaran pendapatan dari privatisasi sebesar Rp 6,5 triliun untuk tahun 2002-2003. Untuk tahun anggaran saat itu. Jadi dari Sudut Pandang ekonomi tidak ada yang dirugikan kata Satya Dengan berapi- api.

Ada pemeo Barat yang mengatakan who is asleep at the wheel? Siapa yang tertidur di roda kemudi? Mengapa DPR dan Marwan Batubara serta Moktar Pabotinggi seolah-olah baru



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

terbangun dari tidur dan kebakaran jenggot dalam soal privatisasi Indosat? Bukankah rencana penjualan saham Indosat sudah dibicarakan sejak tahun 2001? Atau, kalau memang DPR tidak menghendaki BUMN dijual kepada pihak asing, mestinya DPR bisa memagari agar penjualan saham BUMN hanya boleh dilakukan kepada warga Negara Indonesia. Federasi Serikat Pekerja BUMN bersatu ingin ubah tradisi itu," kata Satya . Kalau pihak asing sudah jadi pemegang saham signifikan, partai politik pasti akan sungkan minta " jatah" Hiruk-pikuk seperti dalam kasus Indosat ini, menurut Satya , tidak memberikan edukasi publik yang baik. Sialnya, investor akan semakin takut " menjamah Indonesia. Padahal Saat Ini Indonesia membutuh Investasi Luar Negeri dalam memperbaiki ekonomi Indonesia dan penyediaan lapangan kerja yang dicanangkan pemerintahan SBY JK (www.google, 15 April 2007).

Berbagai pernyataan kontra di atas, yang jelas tampak mencolok adalah wacana dari pihak legislatif baik atas nama individu maupun lembaga. Memperlihatkan bahwa DPR “cuci tangan” alias tidak ingin dipersalahkan atas kasus privatisasi BUMN.. Para anggota DPR lupa bahwa lembaganya berperan mengamini kebijakan ini, tugas mereka seharusnya melakukan pengawasan terhadap pemerintah, termasuk dalam mengelola BUMN. Para anggota DPR atas kasus privatisasi BUMN umumnya dan kasus privatisasi PT Telkom dan PT Indosat khususnya, seolah-olah sedang menutupi celah antara pernyataan dan kenyataannya, akibatnya tidak memberi kebenaran tetapi pembenaran semata. Prilaku para politikus seperti ini sudah terpatri di otak politikus sejak politik dipikirkan. Hal inilah oleh Hardiman (2010) disebut sebagai “dusta dalam politik”. Menurutnya kejujuran tidak pernah menjadi keutamaan politis. Sebaliknya, dusta selalu saja berlaku sebagai alat yang diizinkan dalam politik. Izin atas dusta ini dikatakan Plato dalam buku *The Republic*nya bahwa dusta kuasa berfungsi katakanlah sebagai obat penangkal bahaya sebagaimana dokter juga tidak mengatakan yang sebenarnya agar semangat hidup pasiennya tetap ada. Demi stabilitas Negara, dalam krisis yang meradang, berdusta kepada rakyat tampaknya lebih bermanfaat daripada mengatakan



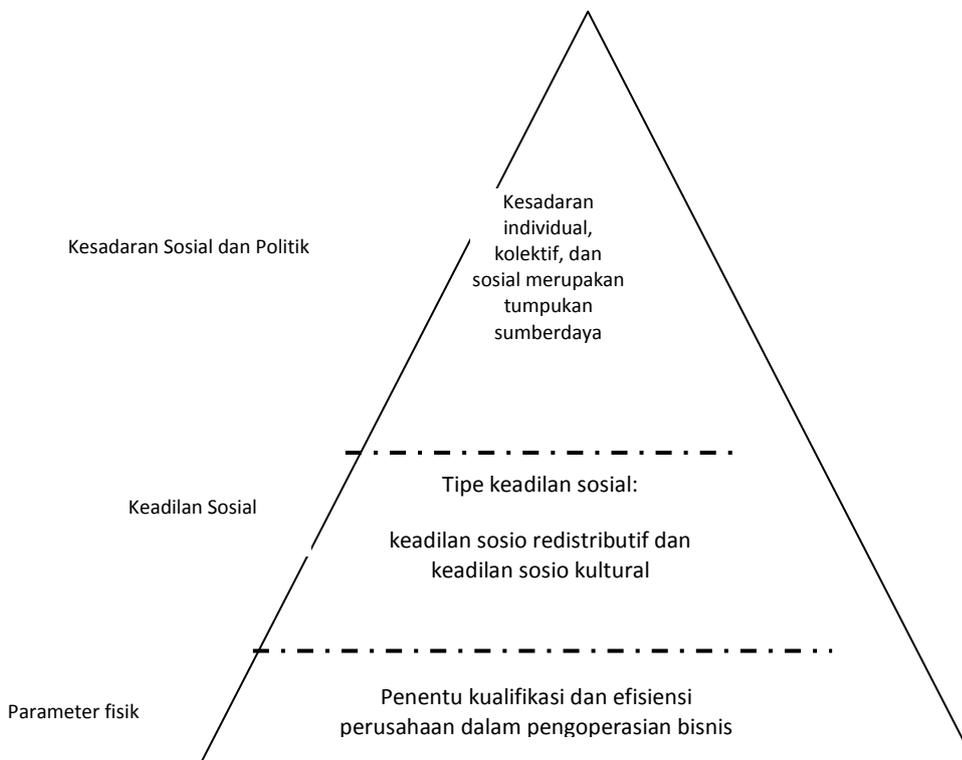
SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

kebenaran (Hardiman, 2010: 6). Dalam konteks kasus privatisasi BUMN, para wakil rakyat tak pernah ingin dipersalahkan, mereka kerap mengabaikan fakta lapangan yang berbeda dengan keyakinannya. Bukankah fakta adalah obyek opini dan opini berasal dari kepentingan yang berbeda-beda.

5. DIMENSI KINERJA PERUSAHAAN SEBAGAI SINTESA PENELITIAN

Berlandaskan pada perspektif *Political Economy of Accounting* (PEA), penulis merumuskan pemahaman kinerja perusahaan mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai parameter fisik, sebagai keadilan sosial, dan sebagai kesadaran sosial dan politik. Menurut Sztompka (2008: 262) bahwa kesadaran (terhadap apapun) dapat menjadi penipu bahkan pendorong munculnya gagasan yang kritis dan tajam dalam memahami realitas. Kondisi demikian, secara sederhana diilustrasikan dalam bentuk Gambar 1. Berikut.

Gambar 1.
Dimensi Kinerja Perusahaan¹



Dimensi kinerja perusahaan tidak hanya berwujud sebagai parameter fisik. Ada wujud lain yang tak kalah penting, yaitu keadilan sosial (sosio redistributif dan sosio kultural) dan kesadaran sosial dan politik². Maksudnya adalah bahwa kinerja perusahaan tidak sebatas tercapainya efisiensi dalam pengoperasian perusahaan, namun juga kemampuan

¹Gambar ini merupakan pemikiran penulis yang diilhami oleh konsep dimensi modal pada penjelasan Tinker (1980: 153).

²Istilah kesadaran sosial politik ini mengacu pada penjelasan Sztompka (2008: 258) bahwa keselarasan (harmoni) sosial (juga politik) harus diletakkan dalam lingkungan. Ada dua jenis lingkungan: (1) lingkungan alam, (2) lingkungan kesadaran. Dalam konteks dimensi kinerja keuangan perusahaan, lingkungan alam adalah sisi yang nyata terwakili oleh pemikiran bahwa dimensi kinerja keuangan perusahaan sebagai parameter fisik. Sedangkan kesadaran adalah tingkatan atas dalam skema ini sebagai “sang lain” dalam dimensi kinerja keuangan perusahaan.

perusahaan mewujudkan konsolidasi keadilan sosial³ yaitu memberikan distribusi laba terhadap *stakeholders* dan penghormatan dan kepedulian terhadap yang lain sebagai manusia yang setara, contohnya identitas lokal dan asing. Apabila perusahaan telah berhasil memenuhi dua wujud kinerja ini menumbuhkan kekuatan positif (berterima oleh semua pihak) bagi kesadaran sosial dan politik. Demikian juga sebaliknya, kesadaran ini menjadi kekuatan negatif (mogok kerja, unjuk rasa, pembakaran infrastruktur dan sebagainya) jika keadilan sosial tidak terkonsolidasikan, lebih dahsyat lagi jika terjadi ketidakadilan sosial. Dalam lingkup suatu Negara, tanpa kemakmuran merata, itu berarti ada ketidakadilan. Padahal ketidakadilan yang terus menerus dilihat dan dirasakan oleh rakyat bisa memicu konflik. Baik itu konflik antar kelompok dan golongan, rakyat dan aparat (Suruji, 2010).

6. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Melalui analisis wacana berdasarkan perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA) atas isu privatisasi ditemukan beberapa realitas yang menjelaskan bahwa Pemerintah memahami privatisasi sebagai piranti untuk meraih rente ekonomi. Privatisasi telah gagal melakukan distribusi kepemilikan. Proses eksploitasi terhadap konsumen dalam bentuk tarif yang tinggi bertambah intensif (kasus pada PT Telkomsel). Kebijakan tarif tinggi adalah wacana yang banyak diproduksi oleh publik. Tarif tinggi dituding sebagai implikasi dari struktur pasar PT Telkom yang monopoli. Tarif tinggi juga diakibatkan oleh dominasi kepemilikan oleh Temasek. Berdasarkan hasil analisis wacana di atas, menilai kinerja khususnya pada BUMN yang mengalami privatisasi tidaklah cukup dengan hanya

³Istilah konsolidasi keadilan sosial ini mengacu pada penjelasan Pribadi (2010:7) bahwa globalisasi telah mengubah cara pandang dalam memahami keadilan sosial. Keadilan sosial tidak semata-mata dalam konteks sosio redistributif (alokasi dan pembagian barang dan jasa secara adil), interaksi terbuka antar-orang per orang yang menembus lintas batas bangsa menghadirkan makna baru sebagai keadilan sosio kultural dalam pengertian pentingnya penghormatan dan kepedulian terhadap yang lain sebagai manusia yang setara.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

mempertimbangkan kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan sebagai bagian dari hal-hal yang intuitif bahkan yang kurang intuitif seperti kesadaran sosial dan politik pun tidak terabaikan. Dengan kata lain hasil penelitian ini telah membangun kajian perspektif *Political Economy Of Accounting* (PEA) menjadi lebih luas.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan dalam simpulan. Penelitian ini berhasil memberikan beberapa implikasi. Pertama, penilaian kinerja (khususnya pada perusahaan yang mengalami privatisasi) tidak dapat mengabaikan aspek keadilan yang terefleksikan dalam distribusi laba kepada *stakeholders*. Kedua, penilaian kinerja (khususnya pada perusahaan yang mengalami privatisasi) belum lengkap tanpa mempertimbangkan kesadaran sosial dan politik. Meskipun kesadaran sosial politik ini adalah variabel yang kurang intuitif atau abstrak, namun sangat berperan dalam merefleksikan kondisi sosial dan politik Negara sehingga *going concern* perusahaan menjadi lebih dapat diramalkan (*predictable*).

Keterbatasan

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: pertama, dimensi kinerja perusahaan yang berhasil diwujudkan dalam penelitian ini belum memasuki tataran spiritual. Pendekatan klasik (PEA) masih terbelenggu dengan nilai-nilai kapitalisme yang cenderung mengabaikan pihak yang tidak berkontribusi langsung dengan institusi,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

memutus nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya serta hampir pasti mengecilkan kepedulian terhadap alam dan lingkungannya⁴.

Kedua, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelusuran data *online* pada penelitian kualitatif belum mentradisi. Karena pada umumnya pada penelitian kualitatif, peneliti langsung melakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik partisipasif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipasif (Bungin, 2008: 129).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. Indosat Harus Dijual Agar Telkom Bersaing. <http://www.detik.com/kolom/20030107-070010.shtml>. 7 Januari.
- Anggoro, P. 2008. Privatisasi BUMN Sebuah Ironi. www.global.just.or. Februari 2009.
- Antara News. 2007. Temasek Singapura Manfaatkan Lemahnya kebijakan Ekonomi Politik RI. <http://www.antara.co.id/arc/2007/10/ekonomi-politik/ri>. 25 Oktober.
- Bisnis Indonesia.. 2009. Privatisasi Indosat Kembali. www.fahrihamzah.com. 12 Januari.
- GATRA. 2002. Harus Balik, Gatra, 17 Desember.
- Hardiman, F.B. 2010. Dusta Dalam Politik, *Kompas*, 12 Februari.
- Inilah Biang Rebut Privatisasi Indosat. 2003. www.kompas.com. 29 Januari.
- Irianto, G. 2004. A Critical Enquiry into Privatisation of State-owned Enterprises: Case of PT Semen Gresik (Persero) Tbk, *PhD Thesis*. University of Wollongong, Australia.
- Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. 1999. *Masterplan Reformasi Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta: Kantor Menteri Pendayagunaan BUMN.
- Kementerian BUMN. 2003. *Penjualan Saham Milik Negara ri Pada PT Indosat, Tbk (PT Indonesian Satellite Corporation Tbk) Kepada Mitra Strategis Tahap Kedua. RI*, Jakarta.
- Kembalikan Indosat dan Telkomsel Sebagai Aset Negara. 2007. <http://id.mail.yahoo.com/>. 4 Juli.
- Kompas. 2007. Transaksi Indosat Diduga Potensial Rugikan Negara. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/05/utama/3575103.htm>. September 2009.

⁴ Haryadi, B. 2009. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Analisis Dari Perspektif Political Economy Of Accounting (Studi Kasus PDAM Kabupaten Pamekasan). *Draft Proposal Disertasi*. Program Doktor Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- Lie, C.W. 2003. Jangan Biarkan Privatisasi Indosat Dipolitisasi, *Tempo Interaktif*, 2 Januari.
- Majalah Trust. 2007. Awas Bahaya Temasek, *Majalah Trust*, 30 Desember-6 Januari.
- Muhammad, Mar'ie. 2003. Pro dan Kontra Privatisasi, *Tempo Interaktif*. 2 Januari.
- Nahadi, B. 2008. Apa Kabar Privatisasi BUMN, *Republika*, 6 November.
- Noll, A. Michael. 2000. Inform Telecommunication Privatization Mixed Progress, *The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications Information and Media* 2 (1): 21-23.
- Prasertiantono T.A. Meruntuhkan Tembok Monopoli. 2003. www.kompas.com/cetak/0309/opini/50658.htm. 5 Agustus 2009.
- Rachbini, D.J. 2001. *Ekonomi di era Transisi Demokrasi*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Raharjo, M. 2007. *Hermeneutika Gadamerian Kuasa Bahasa Dalam Wacana Politik Gus Dur*, UIN-Malang Pres.
- Raharjo, M. 2008. *Dasar-dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gadamerian*, Ar-ruzz Media. Yogyakarta.
- Rais, Amien.M. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Penerbit PPSK Press.
- Republika. 2002. Privatisasi Indosat Gagal Akibat Ulah Pemerintah Sendiri, *Republika*, 17 Juni.
- Shambazy, B. 2010. Presiden Mataram. *Kompas*, 21 Agustus
- Shaoul, J. 1997a. A Critical Financial Analysis of the Performance of Privatised Industries: The Case of the Water Industry in England and Wales, *Critical Perspectives on Accounting* 8: 479-505.
- Shaoul, J. 1997b. The Power of Accounting Reflecting on Water Privatization, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*: 382-405.
- Sinar Harapan. 2001. Telkom Masih Jadi Andalan Pemerintah, *Sinar Harapan*, 26 Desember.
- Sinar Harapan. 2002. Privatisasi Indosat Minta Dibatalkan laksana Didesak Mundur, *Sinar Harapan*, 21 Maret.
- Sokarina, A. 2011. Analisis Kritis Kinerja Pra dan Pascaprivatisasi Dari Perspektif Political Economy Of Accounting (Studi Pada PT Telkom Tbk dan PT Indosat Tbk). *Tesis*. Universitas Brawijaya.
- Sunarsip. 2007. Mencari Format Privatisasi, *Republika*, 30 Agustus.
- Suruji, Andi. 2010. Leadership dan Lederless. *Kompas*. 26 Juni.
- Telkom Masih jadi Andalan. 2008. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/12/ekonomi/lebi25.htm>. 19 Maret.
- Tempo Interaktif. 2002. Privatisasi: Asas Manfaat versus Asas Kepemilikan, <http://www.tempointeraktif.com>, 24 Maret.
- Tempo Interaktif. 2002. Kamis 4 April 2002 07:00:44 WIB Pemerintah Akan Privatisasi 25 BUMN Pada tahun 2002, <http://www.tempointeraktif.com>, 3 April.
- Tempo Interaktif. 2003. Kementerian BUMN Keluarkan Buku Putih Privatisasi Indosat, <http://www.tempointeraktif.com>, 2 Februari.
- Tempo Interaktif. 2002. SP Indosat Tolak privatisasi, <http://www.tempointeraktif.com>, 20 Desember.
-



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- Tinker, A.M. 1980. Towards a Political Economy of Accounting: An Empirical Illustration of The Cambridge Controversies, *Accounting, Organizations and Society* 5 (1): 147-60.
- Tranggono, Indra. 2009. Kebohongan, *Kompas*, 5 Desember.
- Tranggono, Indra. 2010. Kuasa Tafsir Dan Metafora Fauna, *Kompas*, 5 Februari.
- Transaksi Indosat diduga Potensial Rugikan Negara, Manajemen Laporan Keuangan Telah Diaudit Dan Diterima RUPS. 2007. www.kompas.com. 5 Juni.
- Uddin, S dan Hopper, T. 2003. Accounting For Privatisation In Bangladesh: Testing World Bank Claims, *Critical Perspectives on Accounting*. Vol 14. pp. 739-774.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Wijaya, Krisna. 2010. Menggugat Kepemilikan Asing, *Kompas*, 1 Maret.
- Wijayantara, Satya. 2007. Privatisasi Indosat Tidak Merugikan. www.google.com. 15 April.